



BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



KEMISKINAN & KETIMPANGAN DIY 2020

SEKRETARIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kata Pengantar

Kemiskinan dan ketimpangan menjadi isu utama dalam pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya lebih terasa pada periode jangka menengah RPJMD 2012-2017 dan RPJMD 2017-2022. Berdasarkan rilis terakhir dari BPS, pada Maret 2020 angka kemiskinan di DIY mencapai 12,28%. Angka ini lebih besar dibanding tingkat kemiskinan rata-rata Nasional yang sebesar 9,78%. Upaya untuk memecahkan masalah tersebut terus dilakukan oleh Pemda DIY. Salah satunya ditunjukkan dengan komitmen bersama menurunkan angka kemiskinan hingga 7% pada tahun 2022, sekaligus berusaha mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui berbagai kebijakan dan program.

Kemiskinan DIY pada tahun 2020 meningkat dari pada tahun sebelumnya. Meningkatnya angka kemiskinan juga mengindikasikan bahwa bertambahnya penduduk miskin dan rentan baru. Salah satu penyebab meningkatnya penduduk miskin dan rentan adalah terjadinya bencana non alam/pandemic Covid-19. Dampak yang paling berpengaruh dari sisi pendapatan, ketenagakerjaan, dan akses pelayanan dasar.

Buku "Kemiskinan dan Ketimpangan di DIY 2020" disusun untuk memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan dan ketimpangan di DIY. Harapan kami, buku ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi dalam mendukung pembuatan kebijakan maupun program-program berkait. Informasi dalam buku ini relatif memang masih sangat sederhana. Tentu saja masih perlu banyak tambahan agar lebih optimal dalam mendukung pembuatan kebijakan dan program-program. Kami mengharapkan saran dan masukan untuk penyempurnaan materi buku ini. Terima kasih.

Yogyakarta, Agustus 2020

Sebermas

Daftar Isi

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
A. Perumusan Kemiskinan	5
B. Tinjauan Kemiskinan.....	5
1. Penduduk Miskin	5
2. Persentase Penduduk Miskin	8
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan	8
4. Wilayah Perkotaan dan Perdesaan	10
C. Gambaran Kemiskinan	13
1. Persentase Desa Perkotaan dan Desa Perdesaan di DIY	13
2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) DIY	13
a. Jumlah DTKS DIY.....	15
b. DTKS Perdesil DIY	16
3. Perbandingan Kemiskinan di Pulau Jawa dan Bali.....	16
a. Jumlah Penduduk Miskin.....	16
b. Tingkat Kemiskinan	17
c. Garis Kemiskinan.....	17
d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1).....	18
e. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	19
4. Kemiskinan DIY	19
a. Kemiskinan Kota dan Desa DIY.....	19
b. Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan(P2) DIY	20
c. Kemiskinan Makanan dan Non Makanan DIY	21
5. Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Wilayah.....	22
a. Indeks Gini.....	23
b. Indeks Williamson.....	24
6. Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY.....	24
a. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota DIY	24

b.	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota DIY	25
c.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota DIY	26
d.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota DIY	26
7.	Indeks Pembangunan Manusia	26
8.	Kondisi Perekonomian DIY	30
a.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	30
b.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	30
c.	Pertumbuhan PDRB Harga Koston Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014-2018	30
9.	Tingkat Pekerjaan di DIY	31
a.	Tingkat Pekerjaan dan Pengangguran DIY	31
b.	Upah Pekerja Tiap Kabupaten/Kota DIY	33
D.	Review RPJMD 2020	34
1.	Alaasan Review RPJMD DIY	34
2.	Rencanan Perubahan RPJMD DIY	35
E.	Program Kemiskinan Pemerintah DIY	36

A. PERUMUSAN KEMISKINAN

Problem kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu prioritas dalam bahasan RPJMD 2017-2022. Penurunan tingkat kemiskinan di DIY belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya sebagaimana yang direncanakan dalam RPJMD 2017-2022. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan, namun demikian, jumlah penduduk miskin belum bisa diturun secara signifikan. Agar bisa mengejar target tingkat kemiskinan sebesar 5% pada tahun 2022, dibutuhkan perumusan kebijakan yang tepat dalam penanganan masalah kemiskinan. Dengan adanya rumusan masalah yang tepat tersebut, maka akan memudahkan dalam melakukan intervensi program dan kegiatan untuk bisa diterapkan agar dapat meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat hidup sejahtera.

Berdasarkan target yang tercantum dalam RPJMD DIY, target pencapaian tingkat kemiskinan tahun 2020 adalah 9,11%. Sementara realisasi tingkat kemiskinan tahun 2020 per Maret sebesar 12,28%. Ada gap yang cukup lebar yaitu 3.17 poin yang perlu untuk ditindaklanjuti. Hal ini karena pada tahun 2020, angka kemiskinan DIY mengalami peningkatan yang sangat tajam dari pada tahun sebelumnya. Meningkatnya angka kemiskinan juga mengindikasikan bahwa terjadi perbertambahan penduduk miskin dan rentan baru. Salah satu penyebab meningkatnya penduduk miskin dan rentan adalah terjadinya bencana non alam/pandemi Covid-19. Dampak yang paling berpengaruh adalah pada sisi pendapatan, ketenagakerjaan, dan akses pelayanan dasar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa, penanganan kemiskinan kedepan harus ada penangan dan penyesuaian yang berbeda dari sebelumnya serta perlu disesuaikan dengan "new normal/kebiasaan baru". Selain usaha-usaha sebagaimana yang telah dilakukan, diperlukan inovasi dan keterpaduan semua pihak untuk percepatan penurunan kemiskinan.

Dalam rangka penurunan angka kemiskinan, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah akurasi data. Untuk itu, verifikasi dan validasi data mutlak diperlukan, Kehidupan sosial kemasyarakatan DIY adalah Khas, Oleh karena itu perlu adanya indikator yang mampu menggambarkan secara utuh mengukur kondisi kemiskinan masyarakat DIY yang sebenarnya. Indikator ini perlu menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam mengukur kemiskinan. Selain indikator khas di atas, perhitungan tingkat kemiskinan yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik perlu mempertimbangkan intervensi penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan melalui *by name by address* oleh Pemerintah Daerah DIY. Dengan demikian, diharapkan hal yang dilakukan adalah menemukan formulasi perhitungan tingkat kemiskinan dengan memasukkan unsur nilai-nilai kearifan lokal yang tumbuh subur di masyarakat. Diharapkan hasil perhitungan tingkat kemiskinan bisa merepresentasikan kehidupan masyarakat Yogyakarta yang sebenarnya.

B. TINJAUAN KEMISKINAN

1. Penduduk Miskin

Konsep:

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Sumber Data:

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

Garis Kemiskinan (GK)

Konsep:

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber Data:

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

Rumus Penghitungan:

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

- GKM = Garis Kemiskinan Makanan
 GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM

Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference populaion*) yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk, referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM^*_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

- GKM^*_{jp} : Gris Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p .
 P_{jkp} : Rata-rata harga komoditi k di daerah j dan provinsi p .
 Q_{jkp} : Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p .
 V_{jkp} : Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p .
 j : Daerah (perkotaan atau pedesaan).
 p : Provinsi ke- p .

Selanjutnya GKM $_j$ tersebut disetarakan dengan 2100 kilo kalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah “ j ” dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_p = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}, \quad \begin{matrix} K_{jkp} & : & \text{Kalori dari komoditi } k \text{ di daerah } j \text{ di provinsi } p \\ \overline{HK}_{jp} & : & \text{Harga rata-rata kalori di daerah } j \text{ di provinsi } p \end{matrix}$$

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non-makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk.

Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

$GKNM_{jp}$: Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j dan provinsi p

V_{kjp} : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p

r_{kj} : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j

k : Jenis komoditi non-makanan terpilih

j : Daerah (Perkotaan atau pedesaan)

p : Provinsi ke- p

2. Persentase Penduduk Miskin

Konsep:

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Sumber Data:

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Data Kor (data pokok).

Rumus Penghitungan:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

- α = 0
- z = garis kemiskinan
- y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n = jumlah penduduk

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Konsep:

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Sumber Data:

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Data Kor (data pokok).

Rumus Penghitungan:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

- $\alpha = 1$
- z = garis kemiskinan.
- y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- n = jumlah penduduk.

Indeks Keparahan Kemiskinan

Konsep :

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity-P2*) memberikan gambaran mengenai

penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan:

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$),

$y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

4. Wilayah Perkotaan Dan Perdesaan

Mengapa harus dibedakan antara Perkotaan dan Perdesaan? Sesuai Peraturan Kepala BPS no. 37/2010 dijelaskan bahwa pada setiap desa mempunyai karakteristik sosial ekonomi, kondisi dan akses ke fasilitas perkotaan, ciri dan tipologi lingkungan yang berbeda-beda dan akan terus berubah seiring dengan kemajuan tingkat pembangunan di suatu desa. Kondisi yang berbeda dan terus berubah tersebut oleh BPS dijadikan sebagai indikator untuk menggolongkan suatu desa ke dalam desa perkotaan atau desa perdesaan.

Penggolongan desa menjadi desa perkotaan dan desa perdesaan biasanya dilakukan oleh BPS untuk keperluan statistik dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan analisis dan perencanaan pembangunan. Sebagai contoh, BPS biasanya menggunakan klasifikasi desa perkotaan perdesaan sebagai dasar untuk merencanakan kegiatan sensus atau survei. Disamping itu bila sampelnya memungkinkan, dalam penyajian dan analisis data juga dibedakan menurut daerah perkotaan dan daerah perdesaan.

Tabel 1.

Referensi daerah perkotaan dan perdesaan

Referensi	Perkotaan	Perdesaan
1	2	3
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1	Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.	Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 355 (1)	Perkotaan adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa.	-
Peraturan Kepala BPS 37/2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia	Pasal 1 Perkotaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.	Pasal 1 Perdesaan adalah status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi kriteria klasifikasi wilayah perkotaan.
	Pasal 2 (1) Kriteria wilayah perkotaan adalah persyaratan tertentu meliputi : kepadatan penduduk; persentase rumah tangga pertanian; keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan, yang dimiliki suatu desa/kelurahan.	
	Pasal 2 (2) Kriteria fasilitas perkotaan adalah: Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK); Sekolah Menengah Pertama; Sekolah Menengah Umum; Pasar; Pertokoan; Bioskop; Rumah Sakit; Hotel/Bilyar/Diskotek/Panti Pijat/Salon; Persentase Rumah Tangga yang	

Referensi	Perkotaan	Perdesaan
1	2	3
	menggunakan Telepon; dan Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik.	
	Pasal 2 (3) Nilai ≥ 10 .	Pasal 2 (3) Nilai < 10 .

Sumber: Peraturan Kepala BPS 37/2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia

Tabel berikut menampilkan kriteria dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan menurut Peraturan Kepala BPS 37/2010 tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia.

Tabel 2.

Kriteria dan keberadaan/akses pada fasilitas perkotaan menurut Peraturan Kepala BPS 37/2010

Kriteria				Keberadaan/akses pada Fasilitas Perkotaan		
Kepadatan Penduduk per Km ²	Nilai/ Skor	Persentase Rumah Tangga Pertanian	Nilai/ Skor	Fasilitas Perkotaan	Kriteria	Nilai/ Skor
1	2	3	4	5	6	7
< 500	1	>70,00	1	Sekolah Taman Kanak-Kanak	- Ada atau $\leq 2,5$ Km [*])	1
500 - 1249	2	50,00-69,99	2	Sekolah Menengah Pertama	- > 2,5 Km [*])	0
1250-2499	3	30,00-49,99	3	Sekolah Menengah Umum		
2500-3999	4	20,00-29,99	4	Pasar	- Ada atau ≤ 2 Km [*])	1
4000-5999	5	15,00-19,99	5	Pertokoan	- 2 Km [*])	0
6000-7499	6	10,00-14,99	6	Bioskop	- Ada atau ≤ 5 Km [*])	1
7500-8499	7	5,00-9,99	7	Rumah Sakit	- > 5 Km [*])	0
>8500	8	<5,00	8	Hotel/Bilyar/Diskotek/ Panti Pijat/Salon	- Ada - Tidak Ada	1 0
				Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon	- $\geq 8,0$ - < 8,00	1 0
				Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik	- $\geq 90,00$ - < 90,00	1 0

Catatan: Jarak tempuh diukur dari Kantor Desa/Kelurahan

C. GAMBARAN KEMISKINAN

1. Persentase Desa Perkotaan dan Desa Perdesaan di DIY

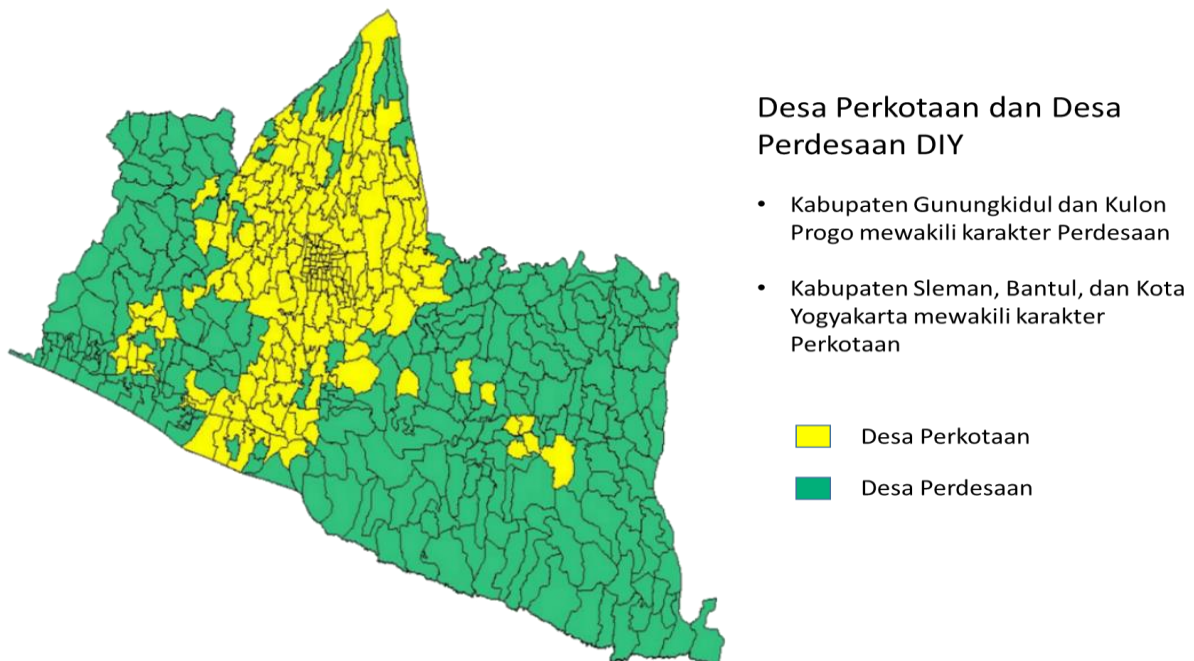
Table berikut ini menyajikan persentase desa perkotaan dan desa perdesaan di DIY sesuai Peraturan Kepala BPS 37/2010.

Tabel 3.

Persentase Desa Perkotaan dan Desa Perdesaan di DIY

Kabupaten / Kota	Perkotaan		Perdesaan		Total Jumlah Kelurahan/Desa
1	2		3		4
Kulon Progo	15	17,05%	73	82,95%	88
Bantul	54	72,00%	21	28,00%	75
Gunungkidul	8	5,56%	136	94,44%	144
Sleman	69	80,23%	17	19,77%	86
Yogyakarta	45	100,00%	0	0,00%	45
DIY	191	43,61%	247	56,39%	438

Sumber: Peraturan Kepala BPS 37/2010, diolah



Gambar 1.

Sebaran desa perkotaan dan desa perdesaan di DIY

Sumber: gis.jogjaprov.go.id, layer desa diolah berdasarkan Peraturan Kepala BPS 37/2010, diolah

2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) DIY

Tabel 4.
Status Perbaikan DTKS DIY

No	Kabupaten	Data Perbaikan DTKS DIY dilihat Dari Segi Rengking Secara Nasional	
1	2	3	
1	Kota Yogyakarta Perode Update : 01-19; 07-19; 10-19; 00; 01-20	Rumah Tangga (Periode Terakhir) Diperbaiki (semua periode) Usulan Baru (Periode Terakhir)	34.048 23.021 (67,60%) 173 (0,50%)
2	Kabupaten Kulon Progo Perode Update : 01-19; 07-19; 10-19; 00; 01-20	Rumah Tangga (Periode Terakhir) Diperbaiki (semua periode) Usulan Baru (Periode Terakhir)	64.274 28.438 (44,20%) 407 (0,60%)
3	Kabupaten Gunungkidul Perode Update : 01-19; 07-19; 10-19; 00; 01-20	Rumah Tangga (Periode Terakhir) Diperbaiki (semua periode) Usulan Baru (Periode Terakhir)	141.731 42.798 (30,20%) 690 (0,50%)
4	Kabupaten Bantul Perode Update : 01-19; 07-19; 10-19; 00; 01-20	Rumah Tangga (Periode Terakhir) Diperbaiki (semua periode) Usulan Baru (Periode Terakhir)	145.902 28.406 (19,50) 83 (0.10%)
5	Kabupaten Sleman Perode Update : 01-19; 07-19; 10-19; 00; 01-20	Rumah Tangga (Periode Terakhir) Diperbaiki (semua periode) Usulan Baru (Periode Terakhir)	142.784 10.485 (7,30%) 1.574 (1,10%)

Sumber: Aplikasi Siks-Dataku, 2020 diolah

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Program Perlindungan Sosial adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Sumber utama DTKS adalah hasil kegiatan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015. DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. DTKS membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat analisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial.

DTKS digunakan untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial. DTKS membantu perencanaan program, memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindungan sosial. Dengan menggunakan data dari DTKS, jumlah dan sasaran penerima manfaat program dapat dianalisis sejak awal perencanaan program. Hal ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial. Pada data di atas merupakan data perbaikan DTKS DIY dilihat dari segi ringking secara nasional menurut kabupaten/kota di DIY. Contoh pada periode update Januari 2019; Juli 2019; Oktober 2019 dan Januari 2020 dapat dilihat Kota Yogyakarta terdapat perbaikan data sebanyak 23.021 (67,60%) dengan usulan baru sebanyak 173 (0,50%) yang sebelumnya sudah terdapat jumlah rumah tangga sebanyak 34.048 pada periode 2019 akhir.

a. Jumlah DTKS DIY

DIY melakukan verifikasi dan validasi tiap tahunnya untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh tiap kabupaten/kota untuk mengupdate data terbaru. Untuk setiap tahunnya data dikeluarkan Kementerian Sosial sebanyak tiga kali dari hasil verwal (verifikasi dan validasi) kabupaten/kota. DTKS merupakan data penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Pada DTKS Januari 2020 jumlah anggota rumah tangga penerima bantuan paling banyak di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul. Untuk jumlah anggota rumah tangga penerima bantuan paling sedikit adalah Kota Yogyakarta. Jumlah DTKS untuk rumah tangga 528.739 dan untuk kategori anggota rumah tangga 1.599.450.

Tabel 5.

Distribusi Jumlah DTKS Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga di Kabupaten/Kota di DIY

NO	KABUPATEN / KOTA	SK DTKS No. 133, Oktober 2019		SK DTKS No. 19, Januari 2020	
		RT (rumah tangga)	ART (anggota rumah tangga)	RT (rumah tangga)	ART (anggota rumah tangga)
1	2	3	4	5	6
1	Kulon Progo	66,481	217,793	64,274	207,856
2	Bantul	148,715	446,591	145,902	438,071
3	Gunung Kidul	142,876	467,606	141,731	462,058
4	Sleman	142,779	397,579	142,784	390,625
5	Yogyakarta	34,143	104,533	34,048	100,840
Jumlah		534,994	1,634,102	528,739	1,599,450

Sumber: Dinas Sosial DIY 2020, diolah

b. DTKS Perdesil DIY

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menurut SK (Surat Keputusan Menteri Sosial No. 19 tahun 2020, yang di keluarkn pada bulan januari) DTKS No. 19, Januari 2020 dapat menjadi katagori desil. Dimana dapat dibagi dari desil 1 sampai dengan desil 8. Untuk penerima bantuan pemerintah yang paling utama berada di desil 1-desil sampai dengan desil 4 berdasarkan data per januari 2020, DTKS untuk rumah tangga dari desil 1 sampai dengan desil 4 sebesar 338.697.

Tabel 6.

Distribusi Jumlah DTKS Desil 1-4 Kabupaten/Kota DIY

NO	KABUPATEN / KOTA	ART TOTAL (anggota rumah tangga)	RT TOTAL (rumah tangga)	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah Desil 1-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kulon Progo	207,856	64,274	15,357	15,741	5,426	4,632	41,156
2	Bantul	438,071	145,902	23,854	28,112	19,042	12,374	83,382
3	Gunung Kidul	462,058	141,731	11,990	17,882	35,575	31,259	96,706
4	Sleman	390,625	142,784	18,199	24,115	29,156	24,091	95,561
5	Yogyakarta	100,840	34,048	10,899	3,395	4,222	3,376	21,892
Jumlah		1,599,450	528,739	80,299	89,245	93,421	75,732	338,697

Sumber: Dinas Sosial DIY 2020, diolah

3. Perbandingan Kemiskinan Di Pulau Jawa Dan Bali

a. Jumlah Penduduk Miskin

Tabel 7.

Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan) Jawa-Bali Tahun 2015 - 2020

Periode	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten	Bali	Indonesia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mar-15	398.92	4,435.70	4,577.04	550.23	4,789.12	702.40	196.71	28,592.79
Sep-15	368.67	4,485.65	4,505.78	485.56	4,775.97	690.67	218.79	28,513.57
Mar-16	384.30	4,224.32	4,506.89	494.94	4,703.30	658.11	178.18	28,005.41
Sep-16	385.84	4,168.11	4,493.75	488.83	4,638.53	657.74	174.94	27,764.32
Mar-17	389.69	4,168.44	4,450.72	488.53	4,617.01	675.04	180.13	27,771.22
Sep-17	393.13	3,774.41	4,197.49	466.33	4,405.27	699.83	176.48	26,582.99
Mar-18	373.12	3,615.79	3,897.20	460.10	4,332.59	661.36	171.76	25,949.80
Sep-18	372.26	3,539.40	3,867.42	450.25	4,292.15	668.74	168.34	25,674.58
Mar-19	365.55	3,399.16	3,743.23	448.47	4,112.25	654.46	163.85	25,144.72

Periode	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten	Bali	Indonesia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sep-19	362.30	3,375.89	3,679.40	440.89	4,056.00	641.42	156.91	24,785.85
Mar-20	480,86	3,920,23	3,980,90	475,72	4,419,10	775,99	165,19	26 424,02

Sumber: BPS 2020, diolah

b. Tingkat Kemiskinan (%)

Tabel 8.

Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) Jawa-Bali Tahun 2015 - 2020

Periode	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten	Bali	Indonesia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mar-15	3.93	9.53	13.58	14.91	12.34	5.90	4.74	11.22
Sep-15	3.61	9.57	13.32	13.16	12.28	5.75	5.25	11.13
Mar-16	3.75	8.95	13.27	13.34	12.05	5.42	4.25	10.86
Sep-16	3.75	8.77	13.19	13.10	11.85	5.36	4.15	10.70
Mar-17	3.77	8.71	13.01	13.02	11.77	5.45	4.25	10.64
Sep-17	3.78	7.83	12.23	12.36	11.20	5.59	4.14	10.12
Mar-18	3.57	7.45	11.32	12.13	10.98	5.24	4.01	9.82
Sep-18	3.55	7.25	11.19	11.81	10.85	5.25	3.91	9.66
Mar-19	3.47	6.91	10.80	11.70	10.37	5.09	3.79	9.41
Sep-19	3.42	6.82	10.58	11.44	10.20	4.94	3.61	9.22
Mar-20	4,53	7,88	11,41	12,28	11,09	5,92	3,78	9,78

Sumber: BPS 2020, diolah

c. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)

Tabel 9.

Perbandingan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Jawa-Bali Tahun 2015 - 2020

Periode	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten	Bali	Indonesia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mar-15	487,388	306,876	297,851	335,886	305,171	336,483	321,834	330,776
Sep-15	503,038	318,602	309,314	347,721	316,464	356,436	331,028	344,809
Mar-16	510,359	324,992	317,348	354,084	321,761	367,949	338,967	354,386
Sep-16	520,690	332,119	322,748	360,169	329,172	373,365	346,398	361,990
Mar-17	536,546	344,427	333,224	374,009	342,092	386,753	361,387	374,478

Periode	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten	Bali	Indonesia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sep-17	578,247	354,679	338,815	396,271	360,302	406,988	364,064	387,160
Mar-18	593,108	367,755	350,875	409,744	373,574	431,069	382,598	401,220
Sep-18	607,778	371,376	357,600	414,899	384,750	450,108	388,451	410,670
Mar-19	637,260	386,198	369,385	432,026	397,687	462,726	400,624	425,250
Sep-19	663,355	399,732	381,992	449,485	404,172	485,096	412,906	440,538
Mar-20	680 401	410 988	395 407	463 479	416 001	508 091	429 834	454 652

Sumber: BPS 2020, diolah

d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Tabel 10.

Perbandingan Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Jawa-Bali Tahun 2015 - 2020

Periode	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten	Bali	Indonesia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mar-15	0.52	1.63	2.44	2.93	2.06	0.94	0.66	1.97
Sep-15	0.27	1.67	2.17	2.32	2.13	0.90	1.13	1.84
Mar-16	0.46	1.49	2.37	2.30	1.99	0.80	0.51	1.94
Sep-16	0.43	1.28	2.12	1.75	1.95	0.76	0.53	1.74
Mar-17	0.49	1.45	2.21	2.19	1.87	0.86	0.68	1.83
Sep-17	0.61	1.39	2.11	2.09	2.09	0.78	0.55	1.79
Mar-18	0.51	1.32	1.85	2.07	1.95	0.82	0.69	1.71
Sep-18	0.50	1.13	1.63	1.65	2.07	0.91	0.52	1.63
Mar-19	0.50	1.10	1.53	1.74	1.80	0.76	0.53	1.55
Sep-19	0.4	1.06	1.43	1.54	1.61	0.8	0.5	1,50
Mar-20	0.59	1.13	1.72	1.94	1.82	0.99	0.52	1,61

Sumber: BPS 2020, diolah

e. Indeks Keperahan Kemiskinan (P2)

Tabel 11.

Perbandingan Indek Keperahan Kemiskinan (P2) Jawa-Bali Tahun 2015 - 2020

Periode	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten	Bali	Indonesia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mar-15	0.10	0.43	0.65	0.83	0.52	0.23	0.14	0.53

Periode	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten	Bali	Indonesia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sep-15	0.04	0.49	0.59	0.63	0.61	0.21	0.35	0.51
Mar-16	0.08	0.37	0.63	0.59	0.47	0.17	0.09	0.53
Sep-16	0.08	0.28	0.54	0.36	0.47	0.17	0.11	0.44
Mar-17	0.10	0.37	0.57	0.55	0.45	0.19	0.16	0.48
Sep-17	0.15	0.35	0.55	0.46	0.56	0.16	0.12	0.46
Mar-18	0.11	0.34	0.45	0.50	0.50	0.20	0.18	0.44
Sep-18	0.11	0.26	0.34	0.35	0.56	0.25	0.11	0.41
Mar-19	0.11	0.24	0.30	0.38	0.45	0.18	0.11	0.37
Sep-19	0.07	0.24	0.28	0.3	0.37	0.23	0.1	0,36
Mar-20	0.11	0.22	0.34	0.46	0.43	0.23	0.1	0,38

Sumber: BPS 2020, diolah

4. Kemiskinan DIY

a. Kemiskinan Kota dan Desa DIY

Tabel 12.

Kemiskinan Kota dan Desa DIY Tahun 2015 - 2020

Periode	Persentase Kemiskinan			Jumlah Miskin (000)			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mar-15	13.43	17.85	14.91	329.65	220.57	550.23	347,787	312,249	335,886
Sep-15	11.93	15.62	13.16	292.64	192.91	485.56	359,470	324,386	347,721
Mar-16	11.79	16.63	13.34	297.71	197.23	494.94	364,786	331,308	354,084
Sep-16	11.68	16.27	13.10	301.25	187.58	488.83	370,510	337,230	360,169
Mar-17	11.72	16.11	13.02	309.03	179.51	488.53	385,308	348,061	374,009
Sep-17	11.00	15.86	12.36	298.39	167.94	466.33	413,631	352,861	396,271
Mar-18	11.03	15.12	12.13	305.24	154.86	460.10	426,580	366,256	409,744
Sep-18	10.73	14.71	11.81	298.47	151.78	450.25	432,018	369,606	414,899
Mar-19	10.89	13.89	11.70	304.66	143.81	448.47	452,628	378,873	432,026
Sep-19	10.62	13.67	11.44	298.74	142.15	440.89	472,666	392,748	449,485
Mar-20	11,53	14,31	12,28	326,13	149,59	475,72	487,173	403,173	463,479

Sumber: BPS 2020, diolah

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) DIY

Terkait dengan kemiskinan, indikator lain yang perlu diperhatikan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur kesenjangan antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat homogenitas pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar diantara penduduk miskin itu sendiri. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir nilai indeks P1 D.I. Yogyakarta menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Pada Maret 2019, indeks P1 tercatat sebesar 1,741. Kemudian, pada September 2019, indeks P1 turun menjadi 1,545. Namun demikian pada Maret 2020 indeks P1 meningkat menjadi 1,939.

Peningkatan indeks P1 pada Maret 2020 tersebut menunjukkan kondisi kemiskinan yang memburuk. Meningkatnya indeks P1 memberikan gambaran bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan lebih rendah daripada di perdesaan. Selain itu, terlihat pula bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di perkotaan menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi. Di perdesaan, tingkat kedalaman kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di perdesaan membutuhkan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan upaya pengentasan kemiskinan di perkotaan.

Sejalan dengan indeks P1, indeks P2 juga menunjukkan adanya fluktuasi pada rentang waktu yang sama. Pada Maret 2019, nilai indeks P2 tercatat sebesar 0,384. Selanjutnya, pada September 2019, nilai indeks P2 turun menjadi 0,301. Dengan indeks P2 yang cenderung menurun, kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara penduduk miskin semakin menyempit. Namun demikian pada Maret 2020, sejalan dengan bertambahnya penduduk miskin dan meningkatnya keparahan kemiskinan, indeks P2 juga mengalami peningkatan menjadi 0,456. Situasi ini menunjukkan meningkatnya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin.

Kondisi yang sama juga terjadi di wilayah perkotaan dan perdesaan dimana tingkat kesenjangan antara penduduk miskin menunjukkan adanya fluktuasi. Pada Maret 2019, indeks P2 tercatat sebesar 0,408. Kemudian, pada September 2019, indeks P2 turun menjadi 0,310. Namun, pada Maret 2020 indeks P2 meningkat signifikan menjadi 0,429. Di wilayah perdesaan, indeks P2 juga menunjukkan adanya fluktuasi. Bahkan pada Maret 2020, indeks keparahan kemiskinan di perdesaan meningkat melebihi indeks keparahan di perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

tingkat pengeluaran diantara penduduk miskin di perdesaan lebih heterogen dibandingkan dengan perkotaan.

Tabel 13.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2)

Periode	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1	2	3	4	5	6	7
Mar-15	2.55	3.70	2.93	0.71	1.09	0.83
Sep-15	2.19	2.57	2.32	0.60	0.68	0.63
Mar-16	1.78	3.41	2.30	0.38	1.05	0.59
Sep-16	1.27	2.83	1.75	0.22	0.67	0.36
Mar-17	2.15	2.29	2.19	0.58	0.47	0.55
Sep-17	1.79	2.86	2.09	0.39	0.64	0.46
Mar-18	1.91	2.48	2.07	0.47	0.59	0.50
Sep-18	1.58	1.85	1.65	0.35	0.34	0.35
Mar-19	1.73	1.78	1.74	0.41	0.32	0.38
Sep-19	1.488	1.697	1.545	0.31	0.277	0.301
Mar-20	1.86	2.16	1.94	0.43	0.53	0.46

Sumber: BPS 2020, diolah

c. Kemiskinan Makanan dan Non Makanan DIY

Tingkat kemiskinan ditentukan dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sementara itu, GK tersebut terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kkal/hari. Adapun Garis Kemiskinan Non Makanan menunjukkan banyaknya uang yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan pokok bukan makanan seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Besaran Garis Kemiskinan D.I. Yogyakarta per Maret 2020 adalah garis kemiskinan di D.I. Yogyakarta adalah Rp 463.479 per kapita per bulan. Garis kemiskinan tersebut meningkat 3,11 persen dari kondisi September 2019 yang besarnya Rp 449.485 per kapita per bulan. Berdasarkan komponen penyusunnya, komoditas makanan masih memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam penentuan GK. Pada Maret 2020, Garis Kemiskinan Makanan (GKM) sebesar Rp 334.461 per kapita per bulan dan memberikan sumbangan sebesar 72,16 persen terhadap pembentukan

GK. Adapun Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang tercatat sebesar Rp 129.019 memberikan kontribusi sebesar 27,84 persen terhadap GK.

Tabel 14.

Garis Kemiskinan Makanan dan bukan Makanan DIY

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
1	2	3	4
Perkotaan			
Maret 2018	301 252	125 328	426 580
September 2018	305 495	126 523	432 018
Maret 2019	323 635	128 992	452 628
September 2019	338 723	133 943	472 666
Maret 2020	350 055	137 118	487 173
Perdesaan			
Maret 2018	270 706	95 550	366 256
September 2018	271 415	98 191	369 606
Maret 2019	279 124	99 749	378 873
September 2019	286 565	106 183	392 748
Maret 2020	296 144	107 028	403 173
Kota+Desa			
Maret 2018	292 472	117 272	409 744
September 2018	296 077	118 822	414 899
Maret 2019	310 947	121 079	432 026
September 2019	322 999	126 486	449 485
Maret 2020	334 461	129 019	463 479

Sumber: BPS 2020, diolah

5. Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Wilayah

a. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan peningkatan dibandingkan kondisi satu semester sebelumnya. Hal ini tercermin dari angka Gini Ratio Maret 2020 yang tercatat sebesar 0,434 atau naik 0,006 poin dibandingkan September 2019 sebesar 0,428. Perkembangan Gini Ratio di D.I. Yogyakarta selama periode Maret 2019 - Maret 2020. Terlihat bahwa angka Gini Ratio pada periode tersebut berfluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat. Selama kurun waktu tersebut, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di D.I. Yogyakarta mencapai puncaknya pada Maret 2018

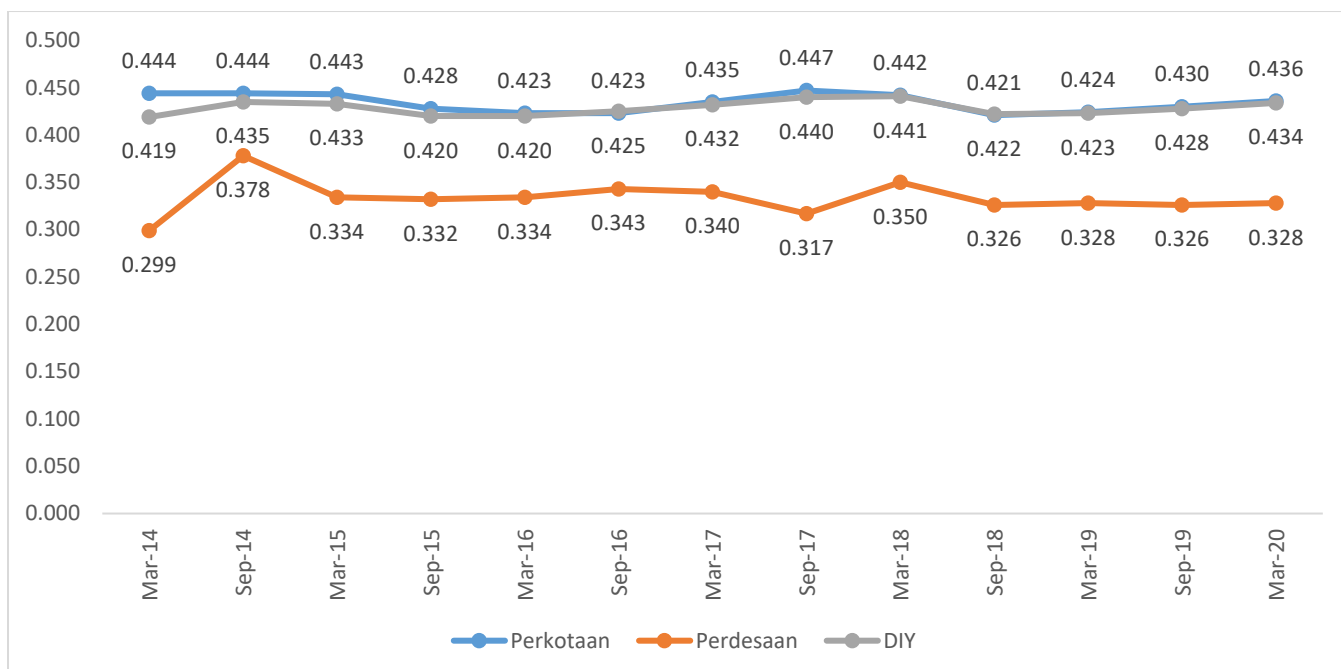
yang diindikasikan dengan angka Gini Ratio sebesar 0,441. Adapun tingkat ketimpangan pengeluaran yang terendah terjadi pada Maret 2014 dengan angka Gini Ratio sebesar 0,419. Selain itu, yang perlu mendapat perhatian adalah selama satu tahun terakhir angka Gini Ratio D.I. Yogyakarta mengalami peningkatan berturut-turut.

Tabel 15.
Perkembangan Gini Rasio di Wilayah Jawa-Bali

Periode	Gini Rasio							
	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten	Bali	Indonesia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mar-15	0.431	0.415	0.382	0.433	0.415	0.401	0.377	0.408
Sep-15	0.421	0.426	0.382	0.420	0.403	0.386	0.399	0.402
Mar-16	0.411	0.413	0.366	0.420	0.402	0.394	0.366	0.397
Sep-16	0.397	0.402	0.357	0.425	0.402	0.392	0.374	0.394
Mar-17	0.413	0.403	0.365	0.432	0.396	0.382	0.384	0.393
Sep-17	0.409	0.393	0.365	0.440	0.415	0.379	0.379	0.391
Mar-18	0.394	0.407	0.378	0.441	0.379	0.385	0.377	0.389
Sep-18	0.390	0.405	0.357	0.422	0.371	0.367	0.364	0.384
Mar-19	0.394	0.402	0.361	0.423	0.37	0.365	0.366	0.382
Sep-19	0.391	0.398	0.358	0.428	0.364	0.361	0.37	0.380
Mar-20	0,399	0,403	0,362	0,434	0,366	0,363	0,369	0,381

Sumber: BPS 2020, diolah

Di daerah perkotaan D.I. Yogyakarta, tingkat ketimpangan dalam periode satu tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada Maret 2019, Angka Gini Ratio tercatat sebesar 0,424. Kemudian, pada September 2019, angka Gini Ratio bertambah menjadi 0,430 yang mengindikasikan adanya peningkatan ketimpangan penduduk. Selanjutnya, pada Maret 2020, angka Gini Ratio kembali naik menjadi 0,436. Sebaliknya di daerah pedesaan, tingkat ketimpangan relatif stabil dalam kurun waktu Maret 2019 sampai dengan Maret 2020. Pada Maret 2019, angka gini rasio di pedesaan sebesar 0,328. Selanjutnya, pada September 2019, angka Gini ratio turun menjadi 0,326. Namun, pada Maret 2020, angka Gini Ratio kembali ke 0,328. Nilai Gini Ratio di pedesaan yang lebih rendah daripada di perkotaan menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan penduduk di pedesaan lebih baik daripada di perkotaan.



Gambar 3.

Perkembangan Gini Rasio Menurut Daerah Tempat Tinggal di DIY Tahun 2014-2020

b. Indeks Williamson (Ketimpangan Wilayah)

Tabel 16.

Indek Wiliamson DIY Tahun 2013 - 2017

Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
DIY	0,472	0,472	0,470	0,466	0,457
Indonesia	0,742	0,759	0,726	0,725	0,672

Sumber: Sumber: Nazara 2018:26, diolah

6. Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY

a. Persentase Penduduk Miskin (%) Kabupaten/Kota DIY

Tabel 17.

Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012 - 2019

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
2012	23.32	16.97	22.72	10.44	9.38
2013	21.39	16.48	21.70	9.68	8.82
2014	20.64	15.89	20.83	9.50	8.67
2015	21.40	16.33	21.73	9.46	8.75
2016	20.30	14.55	19.34	8.21	7.70

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)				
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
2017	20.03	14.07	18.65	8.13	7.64
2018	18.30	13.43	17.12	7.65	6.98
2019	17.39	12.92	16.61	7.41	6.84

Sumber: BPS 2019, diolah

b. Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan) Kabupaten/Kota DIY

Tabel 18.

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012 - 2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)				
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
2012	92.44	158.78	156.49	116.84	37.40
2013	86.50	156.61	152.38	110.84	35.62
2014	84.67	153.49	148.39	110.44	36.60
2015	88.13	160.15	155.00	110.96	35.98
2016	84.34	142.76	139.15	96.63	32.06
2017	84.17	139.67	135.74	96.75	32.20
2018	77.72	134.84	125.76	92.04	29.75
2019	74.62	131.15	123.08	90.17	29.45

Sumber: BPS 2019, diolah

c. Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota DIY

Tabel 19.

Persentase Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012 - 2019

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)				
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
2012	256,575	284,923	238,438	288,048	333,232
2013	259,945	292,639	238,056	297,170	353,602
2014	265,575	301,986	243,847	306,961	366,520
2015	273,436	312,514	250,630	318,312	383,966
2016	297,353	332,057	264,637	334,406	401,193
2017	312,403	347,476	277,261	351,331	423,815
2018	323,105	369,480	288,748	370,127	467,061
2019	333,781	381,538	301,125	382,868	495,562

Sumber: BPS 2019, diolah

d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota DIY

Tabel 20.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012 - 2019

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
2012	3.72	2.78	3.74	2.20	1.60
2013	2.69	2.63	3.54	1.43	1.24
2014	3.22	2.44	3.74	1.15	1.14
2015	4.16	3.16	4.55	1.46	1.06
2016	3.55	2.02	4.16	1.36	1.05
2017	2.79	2.21	3.36	1.23	1.58
2018	2.47	2.17	3.84	0.98	1.38
2019	2.72	1.87	2.58	1.13	0.85

Sumber: BPS 2019, diolah

e. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota DIY

Tabel 21.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012 - 2019

Tahun	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta
1	2	3	4	5	6
2012	0.95	0.80	0.91	0.71	0.38
2013	0.51	0.69	0.86	0.30	0.27
2014	0.69	0.59	1.03	0.22	0.26
2015	1.24	0.89	1.33	0.37	0.23
2016	1.00	0.41	1.30	0.34	0.19
2017	0.64	0.56	0.79	0.28	0.48
2018	0.56	0.46	1.16	0.20	0.34
2019	0.61	0.43	0.53	0.23	0.20

Sumber: BPS 2019, diolah

7. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,92. Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018. Kualitas pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin membaik yang ditandai oleh peningkatan indikator komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM). • Level IPM D.I. Yogyakarta pada tahun 2019 telah mencapai 79,99. Angka IPM ini berada di peringkat tertinggi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta

dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan level IPM Indonesia yang sebesar 71,92. Angka IPM D.I. Yogyakarta tahun 2019 meningkat 0,46 poin atau tumbuh 0,58 persen dibandingkan dengan IPM tahun 2018 (79,53).

Predikat IPM tertinggi di DIY masih dipegang Kota Yogyakarta disusul dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Ketiga kota dan kabupaten tersebut masih di atas IPM DIY yaitu di atas 80. IPM terendah ada di Kabupaten Gunungkidul yang sebesar 69,96 di tahun 2019, terendah kedua yaitu Kabupaten Kulon Progo sebesar 74,44. Kedua kabupaten dengan IPM terendah tersebut berada di bawah IPM DIY yaitu 79,99 pada tahun 2019.

Tabel 22.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia						
	Kulon Progo	Bantul	Gunungkidul	Sleman	Yogyakarta	DIY	Indonesia
1	2	3	4	5	6	7	8
2011	69.53	75.79	64.83	80.04	82.98	75.93	67.09
2012	69.74	76.13	65.69	80.10	83.29	76.15	67.70
2013	70.14	76.78	66.31	80.26	83.61	76.44	68.31
2014	70.68	77.11	67.03	80.73	83.78	76.81	68.90
2015	71.52	77.99	67.41	81.20	84.56	77.59	69.55
2016	72.38	78.42	67.82	82.15	85.32	78.38	70.18
2017	73.23	78.67	68.73	82.85	85.49	78.89	70.81
2018	73,76	79,45	69,24	83,42	86,11	79,53	71,39
2019	74,44	80,01	69,96	83,85	86,65	79,99	71,92

Sumber: BPS 2019, diolah

Kecamatan yang IPM 10 tertinggi berada di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. IPM dengan urutan tertinggi pada Kecamatan Depok, Gondokusuman, Pakualaman, Mlati, Mergangsan, Ngaglik, Ngampilan, Kraton, Wirobrajan dan Mantrijeron. IPM tertinggi di Kecamatan Depok dengan IPM sebesar 90,47. IPM untuk 10 kecamatan terendah di Kabupaten Gunungkidul. Kecamatan IPM terendah berada di Kecamatan Tanjungsari, Rongkop, Semanu, Paliyan, Nglipar, Purwosari, Panggang, Tepus, Gedang sari dan Sapto sari. IPM terendah di Kecamatan Sapto sari sebesar 64,92.

Tabel 23.

IPM Kecamatan tahun 2018

No	Kabupaten	Kecamatan	IPM 2018
1	2	3	4
1	SLEMAN	DEPOK	90,47
2	YOGYAKARTA	GONDOKUSUMAN	89,01
3	YOGYAKARTA	PAKUALAMAN	88,50

No	Kabupaten	Kecamatan	IPM 2018
1	2	3	4
4	SLEMAN	MLATI	86,70
5	YOGYAKARTA	MERANGSAN	86,25
6	SLEMAN	NGAGLIK	86,06
7	YOGYAKARTA	NGAMPILAN	86,01
8	YOGYAKARTA	KRATON	85,60
9	YOGYAKARTA	WIROBRAJAN	85,28
10	YOGYAKARTA	MANTRIJERON	85,21
11	YOGYAKARTA	JETIS	85,10
12	YOGYAKARTA	UMBULHARJO	85,04
13	BANTUL	KASIHAN	84,96
14	YOGYAKARTA	KOTAGEDE	84,78
15	SLEMAN	KALASAN	84,48
16	SLEMAN	NGEMPLAK	84,27
17	BANTUL	SEWON	83,96
18	YOGYAKARTA	TEGALREJO	83,57
19	SLEMAN	GAMPING	82,76
20	BANTUL	BANGUNTAPAN	82,50
21	BANTUL	SEDAYU	82,14
22	BANTUL	BANTUL	82,11
23	YOGYAKARTA	DANUREJAN	81,87
24	SLEMAN	PAKEM	81,77
25	YOGYAKARTA	GONDOMANAN	81,68
26	BANTUL	SANDEN	81,51
27	SLEMAN	MOYUDAN	81,42
28	SLEMAN	GODEAN	81,14
29	YOGYAKARTA	GEDONG TENGEN	81,01
30	SLEMAN	SLEMAN	80,57
31	BANTUL	PIYUNGAN	80,50
32	SLEMAN	BERBAH	80,47
33	SLEMAN	TURI	80,39
34	BANTUL	JETIS	80,30
35	BANTUL	BAMBANG LIPURO	80,08
36	SLEMAN	MINGGIR	79,75
37	SLEMAN	SEYEGAN	79,25
38	BANTUL	PANDAK	78,77
39	BANTUL	KRETEK	78,68
40	SLEMAN	TEMPEL	78,34
41	BANTUL	SRANDAKAN	78,17
42	KULONPROGO	WATES	77,89
43	BANTUL	PUNDONG	77,83

No	Kabupaten	Kecamatan	IPM 2018
1	2	3	4
44	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	77,82
45	BANTUL	PAJANGAN	77,62
46	KULONPROGO	TEMON	77,35
47	BANTUL	IMOGIRI	77,12
48	SLEMAN	CANGKRINGAN	77,06
49	BANTUL	PLERET	77,02
50	SLEMAN	PRAMBANAN	77,01
51	KULONPROGO	PANJATAN	75,71
52	KULONPROGO	PENGASIH	75,24
53	BANTUL	DLINGO	73,93
54	KULONPROGO	GALUR	73,92
55	KULONPROGO	LENDAH	72,86
56	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	72,42
57	KULONPROGO	NANGGULAN	72,16
58	KULONPROGO	KALIBAWANG	71,81
59	KULONPROGO	SENTOLO	71,60
60	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	70,02
61	KULONPROGO	GIRIMULYO	69,99
62	GUNUNGKIDUL	SEMIN	69,81
63	GUNUNGKIDUL	PATUK	69,77
64	KULONPROGO	SAMIGALUH	69,70
65	KULONPROGO	KOKAP	69,18
66	GUNUNGKIDUL	PONJONG	68,86
67	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	68,76
68	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	68,30
69	GUNUNGKIDUL	TANJUNGSARI	68,14
70	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	67,89
71	GUNUNGKIDUL	SEMANU	67,59
72	GUNUNGKIDUL	PALIYAN	67,57
73	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	67,23
74	GUNUNGKIDUL	PURWOSARI	66,77
75	GUNUNGKIDUL	PANGGANG	66,66
76	GUNUNGKIDUL	TEPUS	65,55
77	GUNUNGKIDUL	GEDANG SARI	65,16
78	GUNUNGKIDUL	SAPTO SARI	64,92

Sumber : Analisis Indeks Pembangunan Manusia Per Kecamatan DIY, BPPSD Bappeda DIY 2020, diolah

8. Kondisi Perekonomian DIY

a. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Tabel 24.

PDRB ADHK (2010) Menurut Kabupaten/Kota (Miliar rupiah) Tahun 2016–2019

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018*	2019**	Rata - Rata
1	2	3	4	5	6
Kulon Progo	6,580.68	6,973.41	7,729.57	87,772.58	27,264.06
Bantul	16,375.51	17,209.87	18,150.88	19,154.77	17,722.76
Gunungkidul	11,696.16	12,281.87	12,914.88	13,603.37	12,624.07
Sleman	29,563.38	31,140.59	33,139.20	35,289.81	32,283.25
Kota Yogyakarta	23,536.29	24,768.43	26,128.65	27,685.13	25,529.63
DIY	87,685.81	92,300.24	98,024.26	104,489.71	95,625.01

*) : Angka Sementara

***) : Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS DIY Dalam Angka 2020, diolah

b. Produk Domestik Regional Bruto Atas dasar Harga Berlaku (ADHB)

Tabel 25.

PDRB ADHB Menurut Kabupaten/ Kota (Miliar rupiah) Tahun 2016–2019

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018*	2019**	Rata - Rata
1	2	3	4	5	6
Kulon Progo	8,312.00	9,060.47	10,318.26	12,016.93	9,926.92
Bantul	20,913.09	22,611.71	24,443.27	26,345.48	23,578.39
Gunungkidul	14,980.28	16,199.84	17,540.15	18,889.87	16,902.54
Sleman	36,932.84	40,047.86	43,793.25	47,580.78	42,088.68
Kota Yogyakarta	28,895.41	31,309.05	33,818.85	36,599.06	32,655.59
DIY	109,962.35	119,128.72	12,974.34	141,400.18	95,866.40

*) : Angka Sementara

***) : Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS DIY Dalam Angka 2020, diolah

c. Pertumbuhan Ekonomi dan Andil Pertumbuhan menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014-2018

Tabel 26.

Pertumbuhan PDRB Harga Konstan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014-2018 (Persen)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	8
Kulon Progo	4.57	4.62	4.76	5.97	10.62	13.49	7.34
Bantul	5.04	4.97	5.06	5.1	5.48	5.53	5.20
Gunungkidul	4.54	4.82	4.89	5	5.13	5.33	4.95

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7	8
Sleman	5.3	5.18	5.25	5.35	6.38	6.49	5.66
Kota Yogyakarta	5.28	5.09	5.11	5.24	5.48	5.96	5.36
DIY	5.17	4.95	5.05	5.26	6.2	6.6	5.54

*) : Angka Sementara

***) : Angka Sangat Sementara

Sumber: BPS DIY Dalam Angka 2020, diolah

9. Tingkat Pekerja di DIY

a. Tingkat Pekerjaan dan Pengangguran DIY

Penduduk yang bekerja di D.I. Yogyakarta sebanyak 2,088 juta orang atau berkurang 50,24 ribu orang dari Februari 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 2,135 juta orang, bertambah 16 ribu orang dari Agustus 2018.

Tabel 27.

Angkatan Kerja DIY (dalam ribuan)

No	Periode	Angkatan Kerja (000)	
		Bekerja	Pengangguran
1	2	3	4
1	Feb-15	2.012,63	85,45
2	Aug-15	1.891,22	80,25
3	Feb-16	2.037,86	59,00
4	Aug-16	2.042,40	57,04
5	Feb-17	2.055,89	60,08
6	Aug-17	2.053,17	64,02
7	Feb-18	2.076,44	65,60
8	Aug-18	2.118,39	73,35
9	Feb-19	2.138,01	62,89
10	Aug-19	2.134,75	69,17
11	Feb-20	2.087,77	72,97

Sumber: BPS DIY 2020, diolah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2020 sebesar 3,38 persen, mengalami peningkatan 0,52 persen dibanding TPT Februari 2019 sebesar 2,86 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) D.I Yogyakarta pada Agustus 2019 sebesar 3,14 persen, mengalami penurunan 0,21 persen dibanding TPT Agustus 2018 (3,35 persen). Jumlah angkatan kerja D.I. Yogyakarta pada Februari 2020 sebanyak 2,161 juta orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 71,02 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 72,94

persen pada Agustus 2019. Sejalan dengan turunnya jumlah angkatan kerja, TPAK juga mengalami penurunan sebesar 2,14 persen dibandingkan tahun lalu.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Sejalan dengan turunnya jumlah angkatan kerja, TPAK (71,02 persen) juga turun sebesar 2,14 persen poin dibandingkan Februari 2019. Penurunan jumlah angkatan kerja maupun TPAK disebabkan karena terjadi pergeseran penduduk kategori angkatan kerja ke bukan angkatan kerja. Penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga/tidak dibayar, berhenti dan kembali pada kegiatan semula (mengurus rumah tangga dan bersekolah) akibat lapangan usaha yang potensial mempekerjakan mereka tidak lagi menyerapnya. Musim penghujan yang mundur sampai akhir tahun 2019 menyebabkan musim tanam bergeser dan panen yang biasanya bulan Februari mundur menjadi Maret dan April 2020. Selain itu, berhentinya pekerja keluarga/tidak dibayar juga sebagai dampak mulai merebaknya Covid-19 mulai bulan desember tahun 2019 yang menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan sehingga berpengaruh pada usaha perdagangan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT adalah indikator untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja serta untuk memonitoring dan mengevaluasi indikator ketenagakerjaan dalam pembangunan. Berbagai kebijakan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja tampaknya masih cukup berat untuk menekan tingkat laju pengangguran. Hal ini ditunjukkan oleh TPT yang fluktuatif dari 3,06 persen pada Februari 2018 turun menjadi 2,86 persen pada Februari 2019, dan naik lagi menjadi 3,38 persen pada Februari 2020. Meskipun demikian, TPT D.I. Yogyakarta selalu di bawah angka nasional yang berada pada kisaran 4,9 - 5,5 persen. Pada Februari 2020, TPT nasional sebesar 4,99 persen, turun 0,02 persen. Pergeseran musim tanam, dan berakhirnya investasi bangunan proyek strategis di beberapa wilayah (bandara YIA, underpass kentungan, dll) dan mulai mewabahnya Covid-19 menyebabkan bertambahnya pengangguran di D.I. Yogyakarta. Beberapa lapangan usaha terdampak, tidak lagi mampu menyerap tenaga kerja. Panen raya yang biasanya jatuh pada bulan Februari belum bisa dilakukan sehingga kebutuhan pekerja bebas sektor pertanian berkurang. Berakhirnya pembangunan konstruksi proyek strategis di tahun 2019 menyebabkan terjadi penurunan permintaan tenaga kerja sektor konstruksi dan sektor terkait lainnya. Selesainya kegiatan sektor konstruksi menyebabkan penyerapan tenaga kerja di sektor penggalian (pasir dan batu alam) dan sektor perdagangan (bahan bangunan) menurun. Selain itu mulai merebaknya

wabah Covid-19 menyebabkan beberapa usaha mulai mengurangi kebutuhan buruh/karyawan/pegawai.

Tabel 28.
Jumlah TPAK dan TPT DIY

No	Periode	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
	1	2	3
1	Feb-15	73.10	4.07
2	Aug-15	68.38	4.07
3	Feb-16	72.20	2.81
4	Aug-16	71.96	2.72
5	Feb-17	72.00	2.84
6	Aug-17	71.52	3.02
7	Feb-18	72.21	3.06
8	Aug-18	73.37	3.35
9	Feb-19	73.16	2.86
10	Aug-19	72.94	3.14
11	Feb-20	71.02	3.38

Sumber: BPS DIY 2020, diolah

b. Upah Pekerja tiap Kabupaten/Kota DIY

Upah minimum kabupaten/kota di DIY memiliki besaran yang berbeda-beda. Untuk UMK terbesar dipegang Kota Yogyakarta yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp.2.004.000,00 untuk posisi kedua terbesar dipegang oleh Kabupaten Sleman sebesar Rp.1.846.000,00. Sedangkan UMK terkecil dipegang oleh Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp.1.705.000,00. Untuk UMP DIY pada tahun 2020 sebesar Rp.1.704.680,00. Untuk lebih jelasnya perbandingan UMK di DIY dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 29.
UMP DIY Tahun 2015-2020

Wilayah	Upah Minimum Kabupaten/Upah Minimum Provinsi di DI Yogyakarta (Rupiah)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Kulon Progo	1,138,000	1,268,870	1,373,600	1,493,250	1,613,200	1,750,500
Bantul	1,163,800	1,297,700	1,404,760	1,572,150	1,649,800	1,790,500
Gunungkidul	1,108,249	1,235,700	1,337,650	1,454,200	1,571,000	1,705,000
Sleman	1,200,000	1,338,000	1,448,385	1,574,550	1,701,000	1,846,000

Wilayah	Upah Minimum Kabupaten/Upah Minimum Provinsi di DI Yogyakarta (Rupiah)					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
Yogyakarta	1,302,500	1,452,400	1,572,200	1,709,150	1,848,400	2,004,000
DI Yogyakarta	988,500	1,182,510	1,337,645	1,454,154	1,570,923	1,704,608

Sumber: BPS DIY 2020, diolah

D. REVIEW RPJMD 2020

1. Alasan Review RPJMD DIY

Pada RPJMD DIY Tahun 2018-2022 sudah ada target – target yang menjadi standar kerja pemerintah daerah dalam pekerjaannya. Pada saat target di RPJMD dibuat belum diketahui akan terjadinya bencana nasional seperti Covid-19 yang mengubah keadaan ekonomi dan sosial masyarakat. Salah satunya adalah target kemiskinan yang mana pada tahun 2020 ini, angka kemiskinan ditergetkan turun menjadi sebesar 9.11%. Karena terjadi pandemic Covid-19, angka kemiskinan pada Maret 2020 DIY mengalami lonjakan sebesar 12,28%. DIY termasuk mengalami bencana kesehatan yaitu Covid-19, membuat ekonomi masyarakat menurun.

Perlu diketahui bahwa kenaikan angka kemiskinan pada Maret, di DIY belum merupakan dampak langsung dari bencana Covid-19. Perbandingan target di RPJMD pada tahun 2020 dibandingkan dengan rilis BPS pada bulan Maret sudah ada gap yang besar sebesar 3, 17%. Hal ini membuat pemerintah daerah melakukan perubahan pada target-target di RPJMD termasuk target kemiskinan.

Tabel 30.

Perbandingan Persentase Kemiskinan BPS dan Target RPJMD DIY

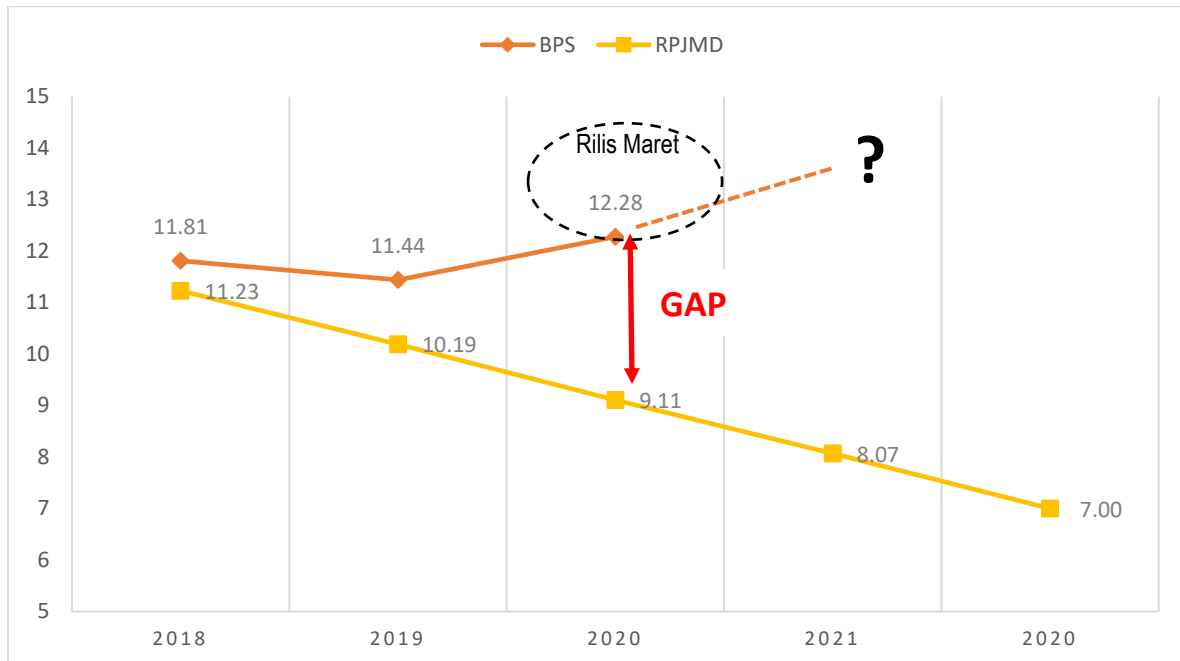
No	Tahun	BPS	RPJMD
1	2	3	4
1	2018	11.81*	11.23
2	2019	11.44*	10.19
3	2020	12.28**	9.11
4	2021	?	8.07
5	2020	?	7.00

*) : BPS rilis September

**) : BPS rilis Maret

Sumber: BPS dan RPJMD DIY, diolah

Apabila memperhatikan terjadi Gap penurunan kemiskinan yang terjadi antara RPJMD dan realisasi sebagaimana dirilis oleh BPS pada bulan Maret 2020. Secara riil terjadi kesenjangan antara rencana dan realisas sebesar 3,17 sebagaimana dijelaskan pada gambar dibawah ini.



Gambar 3.

Perbedaan Gap Antara Persentase Kemiskinan BPS dan Target RPJMD DIY

2. Rencana Perubahan RPJMD DIY

Pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia khususnya di Yogyakarta menyebabkan Pemda DIY melakukan penyesuaian target dengan menyusun perubahan RPJMD untuk merasionalisasikan perubahan capaian target RPJMD pada tahun 2020.

Tabel 31.

Rencana Perubahan RPJMD

Perubahan RPJMD 2020					
Indikator	Realisasi 2019	Target RPJMD/Reviu	Target 2020	Target 2021	Target 2022
1	2	3	4	5	6
Indeks Gini	0,428	Target RPJMD	0,3776	0,3705	0,3635
		Target Reviu	0,475	0,440	0,390
Persentase Angka Kemiskinan	11,44	Target RPJMD	9,11	8,07	7,00
		Target Reviu	12,60	11,90	11,25

Sumber: Bappeda DIY, 2020

Target 2020-2022 dibuat lebih rendah dari target RPJMD dengan pertimbangan capaian sampai dengan tahun 2019 selalu di bawah target. Dengan mempertimbangkan dampak Covid-19, maka jika target masih menggunakan angka RPJMD, semakin sulit dicapai. Selanjutnya, beberapa asumsi penentuan target 2020-2022 adalah sebagai berikut:

Asumsi Target 2020:

Konstraksi perekonomian DIY dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,8 – 1,5%

Inflasi terkendali sebesar 2,5%

Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,3%

Indeks Gini menyesuaikan scenario terkait

Asumsi Target 2021:

Perekonomian DIY mengalami rebound dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,0 – 3,5%

Inflasi terkendali sebesar 3%

Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi sebesar 5%

Indeks Gini menyesuaikan skenario terkait

Asumsi Target 2022:

Perekonomian DIY tumbuh sebesar 3,7 – 4,5%

Inflasi terkendali sebesar 3%

Tingkat Pengangguran Terbuka menurun menjadi sebesar 3,5%

Indeks Gini menyesuaikan skenario terkait

E. PROGRAM KEMISKINAN PEMERINTAH DIY

Pada tahun 2020 Pemerintah Daerah (Pemda) DIY terus berupaya untuk penanganan kemiskinan yang ada di DIY. Untuk mencapai target tersebut, maka program pengentasan kemiskinan harus tepat sasaran. Semua OPD DIY harus turut membantu menuntaskan penanggulangan Kemiskinan serta harus bersinergi dengan tujuan dan strategi penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini setiap kepala OPD dapat menjadi bapak asuh/bapak angkat untuk mendampingi pengendalian/penurunan tingkat kemiskinan yang ada di DIY.

Upaya Pemda DIY untuk menurunkan tingkat kemiskinan dapat terlihat dari program dan kegiatan yang telah OPD lakukan. OPD melakukan beberapa intervensi untuk mengurangi kemiskinan di DIY. Program kegiatan tersebut berupa kegiatan sosial, ekonomi, kesehatan dan infrastruktur. Untuk lebih jelasnya program kegiatan kemiskinan tabel di bawah ini.

Tabel 32.

Program Kegiatan Pemerintah DIY Tahun 2020

Organisasi	Program	Kegiatan
1	2	3
Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga	Program Pendidikan Menengah	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah
Dinas Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat
	Program Pelayanan Pada Blud Bapel Jamkessos	Pelayanan Jaminan Kesehatan
Dinas Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak Bermasalah Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial serta Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar serta Keluarga Rentan dan Miskin
	Program Penanganan Fakir Miskin	Pembinaan Usaha dan Jejaring Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM PKH
	Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas	Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Warga Binaan Balai
	Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Perempuan Penyandang Masalah Sosial	Pelayanan Sosial bagi Perempuan Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai
	Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis, Pemulung Dan Eks Psikotik	Pelayanan Sosial bagi Gelandangan, Pemulung, Pengemis dan Eks Psikotik Warga Binaan Balai
	Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Remaja Penyandang Masalah Sosial	Pelayanan Sosial bagi Remaja Penyandang Masalah Sosial Warga Binaan Balai
	Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Anak Penyandang Masalah Sosial	Pelayanan Sosial bagi Anak Bermasalah Sosial Warga Binaan Balai
	Program Perlindungan Lanjut Usia Terlantar	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Warga Binaan Balai
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Program Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pembinaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Penanganan Desa Rawan Pangan

Organisasi	Program	Kegiatan
1	2	3
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
	Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan Penghargaan Lingkungan hidup
	Program Pengelolaan Tutupan Vegetasi Dan Konservasi Sumberdaya Alam	Konservasi Sumber Daya Alam
	Program Perencanaan Dan Bina Usaha Kehutanan	Penatausahaan Produksi Hasil Hutan
Biro Tata Pemerintahan	Program pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat	Program pengelolaan rekayasa sosial masyarakat	Pembinaan Gotong Royong Kelompok Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	Program pengendalian pertumbuhan penduduk	Pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Program penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru	Pelatihan Kewirausahaan
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	Program pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Pemasyarakatan Perpustakaan dan Minat Baca
Dinas Kelautan dan Perikanan	Program peningkatan produksi perikanan tangkap	Pelatihan Teknis Perikanan Tangkap
	Program peningkatan produksi perikanan tangkap	Pelatihan Manajemen Usaha Perikanan Tangkap
	Program pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	Pengolahan Hasil Perikanan
	Program pengolahan dan pemasaran produksi perikanan	Pemasaran Hasil Perikanan
	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	Pelatihan Teknis Perikanan Budidaya
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program peningkatan produksi tanaman pangan	Budidaya Tanaman Pangan
	Program peningkatan populasi peternakan	Budidaya peternakan
	Program peningkatan produksi perkebunan	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan
Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Program penyelenggaraan energi dan ketenagalistrikan	Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dan Ketenagalistrikan
	Program pengelolaan air tanah	Pendayagunaan Air Tanah
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Organisasi	Program	Kegiatan
1	2	3
	air minum	
	Program penyelenggaraan perumahan	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program perlindungan dan pengamanan konsumen	Pengawasan Peredaran Barang dan Harga Kebutuhan Pokok
Dinas Kebudayaan	Program adat, seni, tradisi dan lembaga budaya	Pengembangan Ekonomi Perempuan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Program perencanaan pembangunan sosial-budaya	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB)
	Program pengembangan statistik daerah	Penyediaan Data Statistik

Sumber: Jogjaplan, 2020